

Analisis Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu

Henny Astuti Dahlan^{1*}, Abdul Wahid Mahsuni², Junaidi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: hennyastuti11@gmail.com

ABSTRACT

In this era, the management of an organization cannot be separated from budget availability. In recent years, several issues have come into focus related to budget absorption implemented. This can be seen in Batu City which is in 13th place in the region with the lowest expenditure absorption in east Java. In 2023, the Personnel and Human Resources Development Agency manages a budget of Rp. 11.210.051.507 with a realization of Rp. 10.497.787.685 with a percentage of 93,6% which makes BKPSDM the OPD with the highest absorption in Batu City. Apart from that, this research also aims to analyze employee competency and information technology in implementing financial realization. The method used is a qualitative approach with descriptive methods. At the analysis stage, the researcher made a list of questions for interviews, collected data and carried out data analysis which was carried out by the researcher himself. From the research results, it can be concluded that Budget Planning, Employee Competency and Application of Information Technology play an important role in the implementation of Financial Realization.

Keywords : Budget planning, employee competency and information technology

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era ini pengelolaan suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan anggaran. Belum maksimalnya penyerapan anggaran menjadi kendala dalam proses penganggaran, dimana jumlah anggaran yang dianggarkan sebelumnya belum menggambarkan jumlah realisasi anggaran yang telah dicapai. Hal tersebut menyebabkan kelebihan anggaran/Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang pada akhir tahun harus dikembalikan ke pusat dan menyebabkan adanya penilaian yang kurang baik terhadap kemampuan suatu daerah dalam mengelola anggaran yang diterimanya. Anggaran yang telah dibuat menjadi dasar dalam menilai laporan kinerja finansial Pemerintahan. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis selisih antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009:123). Dengan kata lain, suatu Instansi Pemerintahan dinyatakan sukses dan berhasil jika dapat menyerap 100% (seratus persen) anggaran pemerintah, meskipun hasil serta manfaat yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut belum sesuai harapan (Mahsun, 2006). Belum efektifnya pengelolaan anggaran tercermin dari rendahnya penyerapan anggaran (Fahlevi dan Ananta, 2015).

Dalam mencapai Prioritas Pembangunan Daerah tersebut Kota Batu telah merencanakan beberapa program dan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama dengan DPRD Kota Batu sehingga terbentuklah rencana kerja dan pendanaan daerah akan tetapi dalam perjalanannya Pemerintah Kota Batu belum dapat merealisasikan hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan penyerapan anggaran yang masih rendah sehingga mengakibatkan tidak tercapainya Prioritas Pembangunan Daerah Kota Batu yang direncanakan sebagaimana dikutip dari malang.viva.co.id senin 26 Juli 2023, “Seperti yang nampak pada laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. SiLPA Kota Batu tembus hingga Rp253,2 miliar, naik 4,11

persen dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp243,3 miliar” hal ini menunjukkan lemahnya realisasi program kegiatan yang disusun oleh OPD dan disepakati saat pembahasan penyusunan anggaran, dimana anggaran yang disusun tersebut diperuntukkan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan kutipan radarmalang.jawapos.com Rabu, 12 Oktober 2022 “hingga bulan September atau triwulan III, realisasi belanja APBD baru di angka 44 persen.

Beberapa informasi dan fenomena yang telah disajikan tersebut peneliti tertarik dengan meneliti suatu OPD di Pemerintah Kota Batu yang tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan yaitu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengelola anggaran sebesar Rp. 11.210.051.507 dengan realisasi Rp.10.497.787.685 dengan persentase 93.6%.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Perencanaan Anggaran dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu?
- 2) Bagaimana Kompetensi Pegawai dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu?
- 3) Bagaimana Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Prosedur Perencanaan Anggaran dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu;
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Kompetensi Pegawai dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu;
- 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu;

Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Kota Batu: hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Batu dalam mendukung peningkatan realisasi anggaran tiap OPD sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Bagi Peneliti: hasil penelitian ini memberikan pengalaman bagi peneliti berupa pengembangan wawasan dan pemikiran tentang peningkatan pengelolaan terutama yang menyangkut pengelolaan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran merupakan salah satu alat yang mempunyai peran penting bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009:61).

Konsep Penyerapan Anggaran

Tahapan Penyerapan anggaran dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh DPR. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang

pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres Nomor 42 Tahun 2002 (Kuncoro, 2013). Dalam pemerintah daerah penyerapan anggaran berarti kegiatan atas pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah UU (APBD) yang disahkan oleh DPRD.

Pengelolaan Anggaran

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori dari George R. Terry. Alasannya karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi dilapangan. Dengan demikian perencanaan adalah suatu tahapan awal kegiatan pengelolaan yang sangat dibutuhkan untuk memberi arah, sasaran dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengorganisasian berhubungan erat dengan suatu penggabungan sumber daya yang ada guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Kemudian penggerakan atau pelaksanaan kegiatan berpatokan dari perencanaan yang dibuat sebelumnya. Tahapan akhir yakni pengawasan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi yang digunakan dalam proses perbaikan kegiatan sehingga tujuan yang sudah ditargetkan/direncanakan bisa terwujud dengan baik.

Kompetensi Pegawai

Kompetensi adalah keterampilan dari seorang ahli. Kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksikan pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Analisa kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan karir, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Definisi Teknologi informasi yaitu suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Wijono, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi diantaranya adalah:

- (1) Pemanfaatan komputer baik hardware maupun software, dan
- (2) penggunaan sistem jaringan yang terintegrasi

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif eksplanasi dengan pendekatan kualitatif. Metode eksplanasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bentuk dari memberikan kejelasan dalam suatu permasalahan atau temuan dalam penelitian.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif eksplanasi dengan pendekatan kualitatif adalah peneliti bertujuan untuk mengungkap data dan informasi sebanyak mungkin tentang Analisis Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis yang diterima atau ditolak, tetapi lebih ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan serta menerangkan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan secara mendalam.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Batu lebih tepatnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313.

Waktu Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei 2024 sampai dengan selesai.

Responden/Informan Penelitian

Dalam penelitian implementasi kebijakan pengelolaan penulis menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan fokus tujuan agar memperoleh data yang lebih akurat dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan penulis akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru jika penulis merasa data yang dicari masih belum mencukupi dan lengkap terkumpul yang sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dikaji, dan hasil wawancara serta informasi yang nanti didapat kemudian akan dianalisis sehingga dapat mendalami permasalahan yang penulis angkat. Selanjutnya yang disebut subyek dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Responden/Informan Penelitian

No	Subyek/Informan	Jumlah / Orang
1	Plt. Kepala BKPSDM	1
2	Sekretaris BKPSDM	1
3	Kabid Data, Formasi dan Jabatan	1
4	Kabid Data, Formasi dan Jabatan	1
5	Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian	1
6	Perencana Ahli Muda	1
7	Pranata Komputer Ahli Muda	1
8	Penata Laporan Keuangan	1
Jumlah		8

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Dalam proses penelitian, peneliti melakukan penentuan informan yang menjadi sumber informasi dalam wawancara dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan menggunakan panduan yang telah ditetapkan Peneliti secara langsung mengadakan suatu pengamatan dan peninjauan langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melihat dari dekat bagaimana pelaksanaan penyerapan anggaran yang terutama terkait dengan Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris BKPSDM, Kabid Data, Formasi dan Jabatan, Kabid Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan dan Pembinaan, Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Perencana Ahli Muda, Penata Laporan Keuangan, Pranata Komputer Ahli Muda Dimana wawancara ini akan dilakukan secara langsung dan secara personal (mendalam) dan kemudian hasil wawancara ini akan dijadikan bahan data primer yang akan disandingkan dengan beberapa data sekunder sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan jelas.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yang dimaksud adalah data tertulis berupa dokumen-dokumen, gambar, foto, catatan-catatan dan produk hukum yang berhubungan dengan Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu

Metode Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa teknik pengambilan sampel *purposive* sampling dan *snowball* sampling.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan keterangan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Imam Gunawan (2013:141) sebagai berikut :

1. Observasi

Peneliti secara langsung mengadakan suatu pengamatan dan peninjauan langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melihat dari dekat kegiatan yang berkaitan dengan Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu.

2. Dokumentasi

Pada kegiatan penelitian ini penulis mengambil data tertulis berupa dokumen-dokumen, gambar, foto, catatan-catatan dan produk hukum yang berhubungan dengan Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu.

Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Miles, Huberman dan Saldana dalam Ahmadi (2014:15), yang menerapkan empat (4) langkah dalam menganalisis data dengan cara yaitu : Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan kesimpulan (*Conclusions*

Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini diterapkan cara triangulasi. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka dalam penelitian ini ditempuh langkah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan pendapat para pakar/akademisi;
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat yang turut berpartisipasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No	Regulasi/Dasar	Pembahasan	Pelaksanaan	Analisis	Rekomendasi
1.	Surat Edaran Walikota Batu Nomor : 911/3181 /422.204/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023	1. Prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan;	BKPSDM telah menyusun Rencana Kerja tahunan dan Rencana Kerja Anggaran yang telah di susun pada tahun sebelumnya yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai	Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran BKPSDM tahun 2023 mencapai 93,65% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.210.051.507 terealisasi sebesar Rp. 10.497.787.685.	Pelaksanaan perencanaan Penyusunan Anggaran yang baik tetap harus dipertahankan agar bisa mencapai realisasi keuangan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

No	Regulasi/Dasar	Pembahasan	Pelaksanaan	Analisis	Rekomendasi
		2. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan serta pembiayaan;	dengan Surat Edaran Walikota Batu Nomor : 911/2628 /422.204/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023	keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran di BKPSDM ini tidak terlepas dari perencanaan yang tersusun secara terintegrasi dan terpadu di tambah dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya perencanaan sangat berpengaruh pelaksanaan kegiatan dan juga penyerapan anggaran karena dengan perencanaan yang asal-asalan maka kegiatan yang di inginkan bisa saja tidak terlaksana sehingga anggaran yang terlanjur tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran tidak dapat dipergunakan/ direalisasikan sehingga ini menimbulkan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun	

No	Regulasi/Dasar	Pembahasan	Pelaksanaan	Analisis	Rekomendasi
				Berkekaan dan menjadi tolak ukur yang kurang baik bagi suatu OPD	
2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan	3 kompetensi jabatan ASN yaitu 1. Kompetensi Teknis, 2. Kompetensi Manajerial 3. Kompetensi Sosial Kultural.	Dilihat dari hasil rekap Pengembangan Kompetensi Pegawai, pegawai di BKPSDM telah melaksanakan diklat dalam meningkatkan kompetensinya Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan BKPSDM setiap tahunnya telah menganggarkan Pelatihan/Diklat, Seminar salah satunya tentang Keuangan sehingga SDM Aparatur yang ada dapat diandalkan	Kompetensi dari pegawai dapat mempengaruhi realisasi keuangan, oleh karena pemahaman dari pegawai akan pelaksanaan kegiatan dan juga penentuan rekening belanja juga sangat mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak terlaksananya suatu kegiatan yang telah direncanakan akan berdampak pada realisasi keuangan yang mengakibatkan SILPA dan mempengaruhi Realisasi Anggaran di BKPSDM	Perlu ditingkatkan pelaksanaan Pembinaan Kompetensi Pegawai terutama di Bidang Keuangan sehingga dalam pelaksanaan Realisasi Keuangan dapat tercapai
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan	BKPSDM telah memanfaatkan informasi teknologi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam berbagai bidang	BKPSDM telah menerapkan Pemanfaatan Teknologi Informasi aplikasi SIPD dalam berbagai lini seperti penyusunan rencana kerja	Perlu adanya penambahan jaringan yang lengkap sehingga mempermudah pegawai BKPSDM dalam menerapkan

No	Regulasi/Dasar	Pembahasan	Pelaksanaan	Analisis	Rekomendasi
		daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	urusan salah satunya dalam perencanaan bahkan dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan aplikasi SIPD merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah	dimana semua rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di input dalam SIPD perencanaan. Aplikasi ini dapat menjadi sebuah inovasi yang digunakan untuk melihat rencana kegiatan yang lebih sistematis dan terukur. Dalam kaitannya realisasi anggaran di BKPSDM, SIPD juga digunakan dalam pembuatan laporan realisasi menjadi sebuah alat kontrol dan meminimalisir kesalahan penganggaran bagi BKPSDM dalam hal realisasi anggaran sehingga apabila ada anggaran yang tidak terserap dapat terlihat dan tergambar sehingga dapat dialihkan dalam kegiatan yang lebih memerlukan dana atau yang lebih di prioritaskan	Teknologi Informasi secara maksimal sehingga tercapainya target realisasi keuangan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data dan pengamatan dilapangan terkait Analisis Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di Kota Batu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu. Hal ini di buktikan dari hasil beberapa wawancara dan juga perbandingan antara perencanaan dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, semakin bagus perencanaan maka semakin menunjang realisasi keuangan.

2. Kompetensi Pegawai dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kompetensi Pegawai dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan yaitu dapat mempengaruhi realisasi keuangan, pemahaman dari pegawai akan pelaksanaan kegiatan dan juga penentuan rekening belanja juga sangat mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan. Tidak terlaksananya suatu kegiatan yang telah direncanakan akan berdampak pada realisasi keuangan yang mengakibatkan SILPA dan mempengaruhi Realisasi Keuangan di BKPSDM.

3. Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di BKPSDM Kota Batu

Penggunaan Teknologi Informasi dalam hal ini SIPD yaitu aplikasi berbasis web yang di keluarkan Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu hal yang mendorong dalam keberhasilan BKPSDM dalam perealisasi anggaran/Keuangan. Dengan adanya teknologi informasi tersebut BKPSDM dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga pembiayaan yang dapat mempengaruhi realisasi keuangan di BKPSDM.

Keterbatasan

1. Dalam proses wawancara terdapat beberapa responden yang sulit ditemui karena jadwal responden yang padat.
2. Dalam pelaksanaan penelitian, terdapat kendala terkait proses pengambilan data keuangan Tahun 2023 pada BKPSDM dikarenakan terjadi peralihan aplikasi Keuangan dari SIPD Kemendagri menjadi SIPD RI.

Saran

Berdasarkan ulasan tersebut penulis akan menyampaikan beberapa saran dalam kaitannya Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Realisasi Keuangan di Kota Batu yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Batu diharapkan dapat melakukan kajian ulang dengan menjadikan BKPSDM ataupun OPD lain yang memiliki pencapaian realisasi yang tinggi sebagai percontohan sehingga menyamakan pencapaian yang sudah baik.
2. Menyusun perencanaan prioritas yang matang dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada dari ketersediaan fasilitas dan ketersediaan anggaran.
3. Pimpinan di setiap OPD memiliki kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawabnya dan terus melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi , Rulam , 2014. Metode penelitian Kualitatif. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA

- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. Jurnal Administrasi Publik.
- Kuncoro, E. D. (2013), Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SIPP pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Will. I Dinas Pu Prov.Kaltim. E.Journal Administrasi Bisnis, 1(4)
- Lastanti, H. S. (2018). Tinjauan Terhadap Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi
- Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Jakarta., Salemba Empat
- Khoyrona, Siti (2020) Pengaruh Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah/Opd Kota Pekanbaru
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 4(1).
- Nugroho,Rahadi. 2017 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)
- Oktaviani, Icha, 2020. Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Bandung
- Putri, K. M., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017), Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 8(2).
- Roza, Sapna Julita (2022) Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Ja
- Sitorus, Laila Rofikoh. 2023. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
- Syahroni, Khoirul Habib and , Dr. Triyono, S.E, M.Si (2014) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kesesuaian Tugas - Teknologi Informasi, Dan Kepercayaan Atas Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual (Studi Kasus Pada Bank BPR Di Kabupaten Karanganyar). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- <https://malang.viva.co.id/politik/2725-seperti-tradisi-dprd-kota-batu-keluhkan-tingginya-silpa-tahunan>
- <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811087975/belanja-rendah-diduga-kurang-perencanaan>
- <https://core.ac.uk/reader/35337570>